



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Selama proses penyusunan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Ebhiet Febriat melakukan penelitian dengan judul *Analisis Framing Berita tentang Kenaikan BBM, Listrik, dan Telepon pada Harian Rakyat Merdeka*. Dalam penelitian ini Febriat mengambil isu yang hampir sama dengan isu yang penulis angkat, yakni pemberitaan mengenai kenaikan harga BBM, listrik dan telepon.

Selain memiliki kesamaan dalam tema pemberitaan yang dibahas, penelitian yang dilakukan Febriat pada 2003 itu juga menggunakan jenis penelitian yang sama dengan penulis, yakni menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan Analisis *Framing* model Pan dan Kosicki.

Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, Febriat menyimpulkan bahwa Harian Rakyat Merdeka memframe isu kenaikan BBM, listrik dan telepon, semata-mata sebagai hasil dari ketidakpedulian dan tindakan semena-mena pemerintah terhadap nasib rakyat. *Frame* yang dikembangkan tersebut secara langsung tercermin pada isi pemberitaan mereka selama bulan Januari 2003 .

Walaupun memiliki beberapa kesamaan, dengan penelitian yang dilakukan Febriat. Ada beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan

Febriat dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitiannya, Febriat hanya menggunakan satu media saja, yakni harian *Rakyat Merdeka*, sedangkan penulis menggunakan dua media, yakni harian *Tempo* dan *Kompas*. Selain itu, isu yang diangkat juga sedikit berbeda. Penulis hanya berfokus pada pemberitaan seputar kenaikan harga BBM yang mengangkat pembahasan sikap parpol di DPR terhadap isu kenaikan harga BBM.

Penelitian kedua, adalah penelitian yang dilakukan oleh Suwono. Dalam penelitiannya yang berjudul *Konstruksi Media Massa Atas Realitas Lembaga Pemasyarakatan*. Suwono mencoba menganalisis bagaimana media mengkonstruksi beritanya . Dalam penelitian yang dilakukan pada 2006 itu, Suwono langsung mengkaji empat media sekaligus; *Tempo*, *Kompas*, *Suara Karya*, dan *Suara Pembaruan*. Berdasarkan penelitiannya, Suwono berkesimpulan bahwa harian *Kompas* dan *Suara Karya* mengkonstruksikan berita berdasarkan orientasi memberikan informasi. Sedangkan harian *Tempo* dan *Suara Karya* melakukan konstruksi yang bersifat idealis (mengkritik).

Penulis sama-sama mencoba untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi sebuah berita, dan juga menganalisis pemberitaan yang dilakukan oleh harian *Kompas* dan *Tempo*. Namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian yang dilakukan oleh Suwono. Perbedaan yang paling mendasar adalah, metode penelitian yang digunakan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis *framing* untuk melihat cara media mengkonstruksi beritanya, sedangkan Suwono memilih

menggunakan analisis wacana krisis. Selain itu, topik pemberitaan yang dianalisis juga berbeda. Suwono mengkaji pemberitaan seputar : remisi narapidana Tommy Soeharto, Bob Hasan, Zarima; kunjungan keluarga Tommy Soeharto; serta izin berobat Bob Hassan, sementara penulis memilih topik pemberitaan seputar perdebatan politik yang terjadi di DPR dalam pembahasan terkait rencana kenaikan harga BBM, 1 April 2012.

2.2 Konstruksi Sosial

2.2.1 Konstruksi Sosial atas Realitas

Bertens (1993) dalam Bungin (2006) mengungkapkan bahwa, gagasan konstruktivisme telah muncul sejak Socrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia dan sejak Plato menemukan akal budi dan ide. Gagasan tersebut lebih kongkrit lagi, setelah Aristoteles mengenalkan istilah informasi, relasi, individu, substansi, materi, esensi, dan sebagainya. Ia mengatakan bahwa, manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah logika dan dasar pengetahuan adalah fakta (Burhan Bungin, 2006: 189)

Dalam pandangan paradigma definisi sosial, realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial disekelilingnya. George Simmel dalam Bungin (2006) mengungkapkan bahwa realitas dunia sosial berdiri sendiri di luar individu, yang menurut kesan kita bahwa realitas itu

“ada” dalam diri sendiri dan hukum yang menguasai (Bungin, 2008: 188)

Istilah konstruksi sosial realitas (*social construction of reality*) menjadi terkenal sejak diperkenalkannya oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Mereka menggambarkan bahwa proses sosial terjadi melalui tindakan dan interaksi, di mana individu menciptakan realitas secara terus menerus secara subjektif (Bungin, 2008: 189).

Bungin juga menambahkan bahwa pengetahuan merupakan konstruksi dari individu yang mengetahui dan tidak dapat ditransfer kepada individu lain yang pasif. Karena itu, konstruksi harus dilakukan sendiri olehnya terhadap pengetahuan, sedangkan lingkungan adalah sarana terjadinya konstruksi itu (Bungin, 2008: 190).

Konstruksi sosial atas realitas terjadi secara simultan melalui tiga proses sosial, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Tiga proses ini terjadi di antara individu satu dengan individu lainnya dalam masyarakat (Bungin, 2008: 202). Frans M. Parera (1990) menjelaskan lebih lanjut tentang proses itu (Bungin, 2011: 15) :

Pertama, eksternalisasi (penyesuaian diri) dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. *Kedua*, objektivasi, yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Sedangkan *ketiga*, internalisasi, yaitu proses di mana individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya.

2.2.2 Konstruksi Realitas Sosial Media Massa

Pada kenyataannya, media masa tidak selalu menyajikan beritanya melalui pendekatan positivistik. Media massa terkadang menyajikan berita melalui pendekatan konstruktivisme (Kun Wazis, 2012: v). Itu berarti, apa yang diberitakan media massa bukanlah realitas yang apa adanya, melainkan hasil daripada konstruksi realitas yang dilakukan oleh media itu sendiri.

Max Weber dalam Bungin (2008) melihat realitas sosial sebagai perilaku sosial yang memiliki makna subjektif, karena itu perilaku memiliki tujuan dan motivasi. Perilaku sosial baru dapat dikatakan “sosial” jika subjek dari perilaku sosial itu mengarahkan individu lain kepada subjektivitasnya Realitas yang terkonstruksi juga membentuk opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis (Bungin, 2008:188, 203)

Proses kelahiran konstruksi sosial media massa melalui tahap-tahap sebagai berikut; (a) Tahap menyiapkan materi konstruksi; (b) Tahap sebenarnya konstruksi; (c) Tahap pembentukkan konstruksi dan; (d) tahap konfirmasi (Bungin, 2008: 203).

Menyiapkan materi konstruksi sosial media massa adalah tugas redaksi media massa, biasanya tugas ini dilakukan oleh editor media massa tersebut. Isu-isu penting menjadi fokus media massa, terutama yang berhubungan 3 hal, yaitu kedudukannya (tahta), harta, dan perempuan (Bungin, 2008: 205). Pemberitaan seputar pejabat, kinerja

birokrasi dan pelayanan publik biasanya digolongkan ke dalam permasalahan seputar ‘kedudukan’. Permasalahan seputar ‘harta’ biasanya membahas seputar kemewahan harta, korupsi dan sebagainya. Sementara, permasalahan seputar ‘perempuan’ membahas seputar aurat, wanita cantik dan sebagainya.

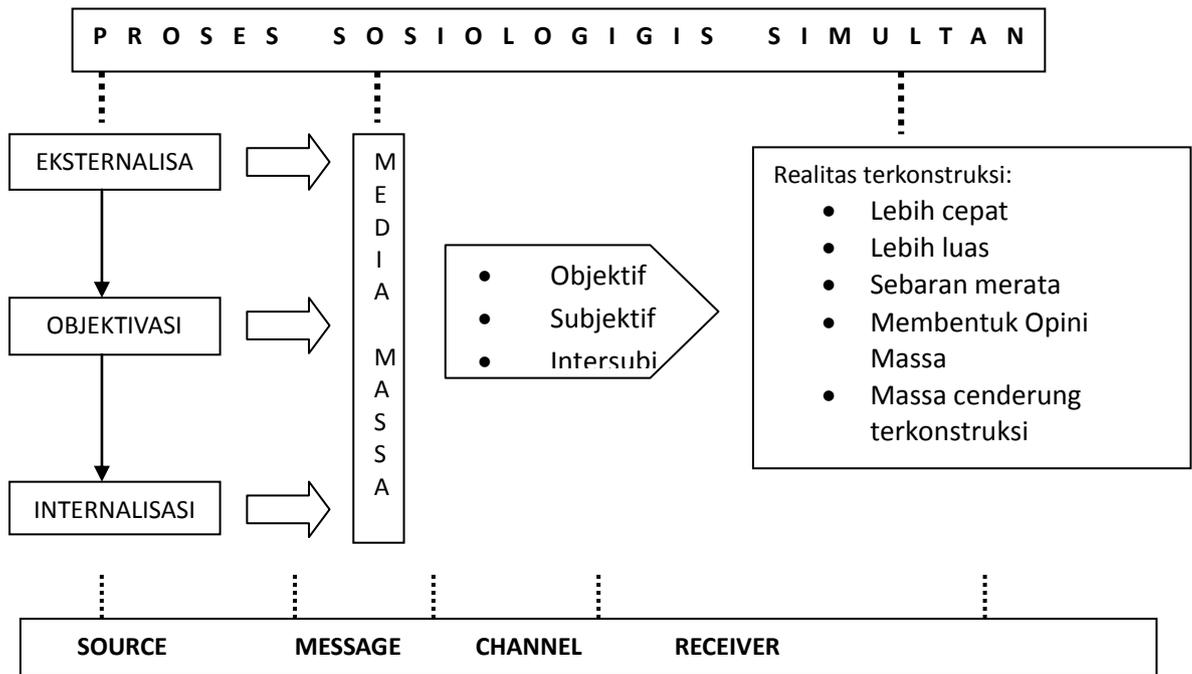
Ada tiga hal penting dalam menyiapkan materi konstruksi sosial: keberpihakan media massa kepada kapitalisme, keberpihakan semua kepada masyarakat dan, keberpihakan kepada kepentingan umum (Burhan bungin, 2006 : 205 – 206).

Keberpihakkan media massa kepada kapitalisme. Hampir semua media massa saat ini digunakan untuk mempengaruhi kekuasaan dan bisnis. Setiap media berusaha untuk menarik minat masyarakat, sehingga laku di pasaran. Media tidak ada bedanya dengan perusahaan-perusahaan lainnya, yang sangat mementingkan keuntungan.

Keberpihakkan semua kepada masyarakat. Bentuk keberpihakan biasanya ditampilkan dalam sikap empati, simpati dan sebagainya. Namun sayangnya, sikap empati dan simpati ini sering kali digunakan hanya untuk “menjual berita” semata.

Kerberpihakan kepada kepentingan umum. Umumnya semua media massa, menempatkan ‘keberpihakan kepada kepentingan umum’ sebagai visi dari media massa tersebut.

Gambar 2.2.2.1 Proses Konstruksi Sosial Media Maasa (Bungin, 2008: 204)



2.3 Analisis Framing

2.3.1 Konsep dan Model Framing

Melalui analisis *framing*, kita bisa menyadari bagaimana upaya media untuk mendefinisikan suatu realitas sosial (Bimo Nugroho, 1999: ix). Sobur menambahkan bahwa analisis *framing* digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi sebuah fakta (Sobur, 2009: 162). Sehingga analisis *framing* cocok digunakan untuk melihat konteks sosial-budaya suatu wacana, khususnya hubungan antara berita dan ideologi. Analisis *framing* digunakan untuk melihat proses atau mekanisme mengenai bagaimana berita membangun, mempertahankan, mereproduksi,

mengubah dan meruntuhkan ideologi. (Eriyanto, 2002: xv)

Eriyanto mengungkapkan bahwa analisis *framing* bisa digunakan untuk melihat siapa mengendalikan siapa dalam struktur kekuasaan. Pihak mana yang diuntungkan, pihak mana dirugikan, kebijakan publik mana yang harus didukung dan tidak boleh didukung dan sebagainya (Eriyanto, 2012: xv)

Konsep *framing* sering digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media lain. Isu-isu yang dianggap penting oleh media tersebut mendapatkan alokasi yang lebih besar dari pada isu-isu lainnya. Robert. M. Entman mendefinisikan *framing* sebagai seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa itu lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi (Bimo Nugroho, 1999: 20).

Pada dasarnya penonjolan yang dilakukan oleh media tersebut tidak bisa dipahami sebagai bias, melainkan secara ideologis sebagai strategi wacana; upaya untuk menyuguhi publik sesuai dengan pandangan dari pada media tersebut, agar padangannya diterima (Sobur, 2009; 164). Jadi intinya *framing* adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media (Eriyanto, 2012: 77). Berikut definisi *framing* menurut para ahli:

Tabel 2.3.1 Derfinisi Framing

Robert N. Entman	Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol ketimbang aspek lain. Ini juga menyertakan penempatan informasi-infomasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari pada sisi yang lain.
William A. Gamson	Cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan. Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan yang disampaikan, serta yang <i>menafsirkan</i> makna pesan-pesan yang ia terima.
Todd Gitlin	Strategi bagaimana realitas dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas.
David E. Snow dan Robert Sanford	Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. Frame yang mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu.
Amy Binder	Skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. Frame mengorganisir peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti makna peristiwa.
Zhondang Pan dan Gerald M. Kociski	Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan kenvensi pembentukan berita.

Terdapat dua rumusan mengenai model perangkat *framing*.

Pertama, model Pan dan Kosicki, yang merupakan modifikasi dari dimensi operasional analisis wacana van *Djik*. Kedua, adalah model

Gamson dan Modigliani. Pan Kosicki mengoprasionalisasikan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat *framing*: sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Sedangkan model Gamson dan Modigliani didasarkan pada pendekatan konstruksionis yang melihat representasi media – berita dan asrtikel, terdiri atas *package* interpretatife yang mengandung konstruksi makna. (Sobur, 2009:175-176)

Pada pendekatan Pan dan Gerald M. perangkat *framing* dapat dibagi dalam empat struktur besar; sintaksis, skrip, tematik dan struktur retorik. Keempat struktur tersebut merupakan suatu rangkaian yang dapat menunjukkan *framing* dari suatu media. Kecenderungan atau kecondongan wartawan dalam memahami suatu peristiwa dapat diamati dari keempat struktur tersebut.

2.3.2. Aspek *Framing*

Ada dua jenis aspek dalam *framing*, yakni memilih fakta/realitas dan menulis fakta. Pertama, memilih fakta/ realitas. Berita yang sama, terkadang bisa disajikan secara berbeda oleh masing-masing surat kabar. Perbedaan ini terjadi, karena seorang masing-masing wartawan memiliki cara pandang yang berbeda pula dalam menyajikan berita tersebut. Berdasarkan sudut pandangnya, wartawan akan memilih fakta apa saja yang akan mereka angkat, dan fakta apa saja yang akan mereka abaikan. Pemilihan fakta tersebut, berdasarkan *angle* yang digunakan penulis dalam melihat isu yang

diangkat. Akibatnya, pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara media yang satu dengan media yang lain. (Eriyanto, 2002: 81)

Kedua, menulis fakta. Setelah seorang wartawan memilah-milah fakta mana saja yang akan mereka angkat, dan fakta apa saja yang mereka abaikan, tindakan berikutnya adalah menyusun fakta-fakta yang sudah dipilih tersebut menjadi sebuah tulisan yang menarik. Gagasan yang hendak dikemukakan bisanya diperkuat dengan: penempatan mencolok (penempatan di *headline* depan, atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggabarkan orang/ peristiwa tertentu (Eriyanto, 2002: 81).

Penggunaan kata, kalimat atau foto itu merupakan implikasi dari memilih aspek tertentu dari realitas. Akibatnya, aspek tertentu yang ditonjolkan menjadi menonjol, lebih mendapatkan alokasi dan perhatian yang besar dari pada aspek lainnya. (Eriyanto, 2002: 81)

2.3.3 Efek *Framing*

Eriyanto membahas lebih dalam mengenai, mengapa sebuah berita yang sama bisa diberitakan secara berbeda-beda oleh media massa? Menurutnya penulis tidak hanya ditangkap oleh penulis, melainkan realitas tersebut dikonstruksi oleh penulis. Dalam proses

konstruksi tersebut ada banyak penafsiran dan pemaknaan yang berbeda-beda dalam memahami realitas. (Eriyanto, 2002: 165)

Eriyanto menambahkan efek dari pada *framing* yang dilakukan oleh media; menonjolkan aspek tertentu dan mengaburkan aspek lain, Menampilkan sisi tertentu dan melupakan sisi lain, menampilkan aktor tertentu dan menyembunyikan aktor lain (Eriyanto, 2002: 167 - 168)

Menonjolkan aspek tertentu dan mengaburkan aspek lain. *Framing* pada umumnya ditandai dengan menonjolkan aspek tertentu dari realitas. Berita secara sadar atau tidak diarahkan pada aspek tertentu. Misalnya pemberitaan kenaikan harga BBM mengaburkan pemberitaan seputar efek kenaikan BBM, tapi lebih sering menonjolkan aspek perdebatan yang dilakukan oleh partai politik.

Menampilkan sisi tertentu dan melupakan sisi tertentu . Misalnya pada pemberitaan mengenai demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa mahasiswa. Pemberitaan banyak membahas mengenai bentrokan bukan masalah tuntutan yang diperjuangkan oleh mahasiswa tersebut.

Menampilkan aktor tertentu dan menyembunyikan aktor lainnya. Berita sering kali berfokus pada aktor-aktor tentu saja. (Jadi hanya fokus kepada beberapa orang-orang saja).

Framing menentukan bagaimana peristiwa didefinisikan, *Framing* juga menentukan apakah peristiwa dianggap sebagai masalah sosial (*social problem*) ataukah tidak. Karena itu, *framing* selalu

berhubungan dengan pendapat umum. Bagaimana tanggapan khalayak, dan bagaimana peristiwa itu dilihat dan dimaknai. Dalam proses pendefinisian masalah sosial tersebut, *framing* memainkan peranan penting. *Framing* adalah mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan perhatian khalayak bagaimana seharusnya peristiwa dilihat (Eriyanto, 2002: 172- 173).

Apa yang menyebabkan suatu peristiwa berita menjadi lebih mudah diingat? W. Lance Bennet dan Regina G. Lawrence pernah membahas mengenai ikon berita (*news icon*). Apa yang khalayak tahu tentang realitas sedikit banyak bergantung pada bagaimana media menggambarannya. Gambaran tentang orang, kelompok, realitas bahkan selalu disesuaikan dengan ikon yang terlanjur sudah tertanam dalam benak publik. Ikon- ikon yang diciptakan dalam pemberitaan membatasi pandangan khalayak. (Eriyanto, 2002: 178)

2.4 Perpolitikan di DPR

Undang-Undang Dasar memang tidak secara langsung menyatakan bahwa Indonesia menganut trias politika. Dalam UUD trias politika digambarkan dengan separasi kekuasaan. Kekuasaan Eksekutif dijalankan oleh Presiden dan para Menteri, kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan kehakiman lainnya, sementara kekuasaan Legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (Yusuf, 2013: 10).

Walaupun Trias Politika diartikan sebagai pemisahan kekuasaan (*separation oof power*) yang mutlak di antara ketiga cabang kekuasaan (Legislatif, eksekutif, yudikatif), tetapi dari pada praktinya, di zaman sekarang ketika tugas negara sudah demikian kompleks, doktrin itu diartikan hanya sebagai pembagian kekuasaan (*distribution of porwers*); artinya hanya fungsi pokoknya yang dipisahkan, sedangkan selebihnya ketiga cabang kekuasaan itu terjalin satu sama lain (Budiardjo, 2008: 289).

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan nama dari lembaga perwakilan atau “parlemen”, yang berlaku di Indonesia (Piliang, 2013: 101). Piliang menjelaskan bahwa tidak mungkin untuk mewujudkan padangan demokrasi langsung, seperti yang dianut oleh Jaques Rousseau.

Faktor-faktor seperti luasnya wilayah negara, populasi penduduk yang sangat cepat, sulit dan rumitnya penanganan terhadap masalah politik dan kenegaraan, serta kemajuan ilmu serta teknologi merupakan kendala untuk melakukan demokrasi langsung. Maka dari itulah muncul demokrasi tidak langsung yang disalurkan melalui lembaga perwakilan.

Lembaga perwakilan atau yang disebut Parlemen, umumnya memiliki lima fungsi (Piliang, 2013: 131): Fungsi perundang-undangan, Fungsi Pengawasan, Hak *Budgettary*, Hak *representatif*, dan Hak institusional.

Fungsi perundnag-undangan adalah fungsi untuk membentuk undang-undang, seperti: UU, UU APBN, ratifikasi perjanjian dengan luar negeri. Fungsi pengawasan, adalah tugas parlemen untuk mengawasi eksekutif, agar

berfungsi menurut undang-undang yang dibentuk parlemen. Hak *budhettary*, membuat parlemen berwenang untuk mengajukan rancangan ABPN dan APBD. Hak representatif, mengizinkan agar pembahasan yang menyangkut kepentingan umum diberitakan oleh media, sehingga rakyat juga dapat mengikuti. Hak *institutional*, hak untuk mendengarkan pengaduan dari masyarakat.

Piliang mengungkapkan bahwa tata cara pengambilan keputusan yang dilakukan legislatif dipengaruhi oleh 3 hal (Piliang, 2013: 153) : kuorum, keputusan berdasarkan mufakat dan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Kuorum adalah posisi dimana rapat DPR dihadiri lebih dari setengah anggota rapat. Apa bila peserta rapat yang datang jumlahnya dibawah setengah dari peserta rapat yang seharusnya, maka rapat terpaksa ditunda. Penundaan dilakukan paling banyak dua kali dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 jam. Setelah dua kali penundaan, dan jumlah peserta rapat masih belum mencapai dari setengah jumlah peserta rapat yang dijadwalkan maka penyelesaian diserahkan kepada Bamus.

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat, biasanya dilakukan setelah semua anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan saran yang dipandang cukup untuk menyelesaikan masalah yang sedang dimusyawarahkan.

Ketika rapat tidak bisa menghasilkan keputusan secara mufakat, karena ada sebagian pihak yang pendiriannya tidak dapat disatukan dengan anggota rapat lainnya, barulah diadakan perhitungan suara. Rapat di DPR

sendiri terbagi menjadi enam bagian (Piliang, 2013 : 150):

a. Rapat Paripurna

Merupakan forum tertinggi DPR dan dipimpin langsung oleh pimpinan DPR.

b. Rapat Paripurna Luar Biasa

Rapat paripurna yang dilaksanakan berdasarkan permintaan Presiden dengan persetujuan Pimpinan DPR.

c. Rapat Kerja

Rapat antara komisi, gabungan komisi, Belg, panitia anggaran, atau panitia khusus, dengan pemerintah atas undangan Pimpinan DPR. Rapat ini dipimpin oleh pimpinan komisi, panitia rapat gabungan komisi, pimpinan Baleg, pimpinan panitia anggaran atau pimpinan Pansus.

d. Rapat Dengar Pendapat

Rapat antar sub-komisi, komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Baleg, atau Pansus dengan pejabat yang mewakili institusinya.

e. Rapat Dengar Pendapat Umum

Rapat antar sub-komisi, komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Baleg, atau Pansus dengan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

f. Setiap Kelengkapan DPR mempunyai jenis rapat sendiri.

Arendt Lipjhart dalam Piliang (2013: 102) mengungkapkan bahwa badan perwakilan rakyat, terbentuk karena rakyat tidak dapat memerintah atau mengatikalasikan kepentingannya secara sendiri-sendiri. Maka dari itulah, DPR berfungsi untuk mewakili kepentingan rakyat.

Berkaitan dengan peranan partai politik, Piliang mengutip Ramlan Subarti, yang membagi tiper perwakilan menjadi empat bagian (Piliang, 2013: 110):

- a. Pandangan yang menyatakan wakil rakyat melaksanakan fungsinya sesuai dengan program partai.
- b. Partai merupakan penghubung antara kepentingan lokal dan kepentingan nasional sehingga memilih partai tertentu berarti mendukung program nasional yang diperjuangkan oleh partai politik. Dengan melaksanakan program partai, wakil rakyat melaksanakan kepentingan nasional.
- c. Apa yang diperjuangkan oleh suatu partai politik, tidak selalu menyangkut kepentingan nasional. Oleh karena itu, wakil rakyat sebagian terkait pada program partai sebagian lagi ditentukan dengan pertimbangan demi kepentingan nasional.
- d. Pandangan yang membedakan perwakilan rakyat dari segi kepentingan siapa yang diperjuangkan oleh wakil rakyat atau didahulukan oleh wakil rakyat, yakni kepentingan daerah atau kepentingan nasional.

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses mengelola negara (Budiardjo, 2008: 397).

Carl J. Friedric menyatakan (Budiardjo, 2008: 404) :

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta materil.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merubut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional – untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, 2008: 404).

Firmanzah (2008 : 67) mengutip Rennney & Kendall (1956) yang melihat bahwa tujuan utama dibentuknya partai politik adalah mendapatkan kekuasaan dan melakukan kontrol terhadap orang yang duduk dalam pemerintahan sekaligus kebijakannya. Partai politik sangat terkait dengan kekuasaan, untuk membentuk dan mengontrol kebijakan publik. Miriam Budiardjo mengungkapkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku, dan inilah inti dari pada politik.

Koalisi di DPR merupakan pilihan politik yang sulit dihindari dalam realitas konfigurasi politik Indonesia, saat ini. Koalisi menjadi hal rasional dalam logika struktur multipartai yang terfragmentasi seperti Indonesia. Karena tanpa koalisi akan sulit mencapai kekuatan mayoritas dan akan sulit pula proses pengambilan keputusan politik di DPR. Keberadaan koalisi antarpartai politik di DPR sekaligus akan memperkuat fungsi *checks and balances* antara parlemen dan pemerintah. Namun pola koalisi yang terbagun dalam struktur multipartai pragmatis seperti Indonesia cenderung melahirkan bangunan koalisi yang cari dan rapuh. (Yuda, 2010: 159).

Partai koalisi di masa pemerintah SBY terbangun berbasis isu pragmatisme politik. Setiap isu cenderung akan melahirkan konfigurasi koalisi yang berbeda-beda (Yuda,2010:169). Rapuhnya ikatan koalisi menyebabkan partai mitra koalisi pemerintah cenderung menggunakan politik dua kaki dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Disatu sisi bergabung di kabinet, tetapi di sisi lain seolah berperan sebagai partai oposisi di DPR. Koalisi pendukung pemerintah yang dibangun Presiden Yudhoyono bukan koalisi permanen, melainkan koalisi pragmatis yang sangat rapuh. (Yuda, 2010: 174).

Sementara itu minoritasnya kekuatan oposisi di awal pemerintah disebabkan adanya kecenderungan bahwa partai politik lebih memilih bergabung di pemerintahan dibandingkan menjadi oposisi. Barangkali opsi terlanjur dimaknai kurang positif bagi efektivitas pemerintahan. Makna oposisi bagi partai politik seolah mengalam distrosi. Oposisi seringkali dianggap sebagai pemberontak yang akan menurunkan pemerintah yang sah. Padahal peran oposisi sejatinya bukan bertujuan menurunkan atau menaikkan pemerintah. Namun lebih dari itu, tujuan utamanya agar adanya fungsi *checks and balances* dalam pengelola negara. Peran partai oposisi sebagai penyeimbang dan pengontrol kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat dibutuhkan dalam logika demokrasi. (Yuda,2010: 172)

Partai politik maupun politikus biasanya melakukan komunikasi politik sebagai berikut (Arifin, 2011: 125): retorika politik, agitasi politik, propaganda politik, lobi politik, dan tindakan politik.

Anwar Arifin (2011: 177) mengungkapkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh partai politik maupun politikus tersebut bertujuan membentuk dan membina citra dan opini publik, mendorong partisipasi politik, memenangkan pemilihan, dan mempengaruhi kebijakan politik negara atau kebijakan publik.

Arifin menjelaskan bahwa citra dipahami sebagai kesan melekat pada individu maupun kelompok. Namun, citra yang dimiliki bisa saja berbeda dengan realitas yang sesungguhnya. Citra politik berkaitan dengan pembentukan opini publik.

Robert dalam Arifin (2011: 177) mengungkapkan bahwa komunikasi politik yang dilakukan partai maupun politikus tidak secara langsung mempengaruhi pendapat maupun perilaku khalayak tetapi, cenderung mempengaruhi cara khalayak mengorganisasikan citra tentang lingkungan dan citra itulah yang mempengaruhi pendapat dan perilaku khalayak.

Partisipasi rakyat terhadap agenda-agenda politik, sangatlah penting. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat berupa kegiatan memberi atau tidak memberi dukungan politik dalam kegiatan, terutama dalam kegiatan kampanye dan pemberian suara dalam pemilihan umum dan penetapan kebijakan publik. Keikutsertaan masyarakat pada memberikan suara dalam pemilihan umum maupun kebijakan publik, merupakan efek dari komunikasi politik yang sangat penting (Arifin, 2011: 210)

Walaupun parlemen memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Indonesia, tetapi amandemen UU 1945 mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia menganut sistem Presidensial, bukan parlementer. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan bertugas untuk melaksanakan program-program

kerjanya sendiri yang ditawarkan saat kampanye (Yuda, 2010: 3).

Menurut Yuda (2010: 3 – 4) efektivitas kekuasaan presiden dalam demokrasi presidensial mengandung dilema politik. Presiden ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan tunggal dalam pemerintahan tetapi pada saat yang bersamaan kekuasaan ini juga dikekang oleh kontrol parlemen melalui mekanisme *check and balance*.